

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

**Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023**



Jln. Pemuda No. 29A, Kopta Bogor 16161

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, Juli 2023

Kepala Balai,



drh. Imron Suandy, MVPH.

NIP. 19780906 200604 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Piutang Bukan Pajak
 - C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
 - C.1.3. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO

- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, Juli 2023
Kepala Balai,

[Handwritten signature]
drh. Imron Suandy, MVPH.
NIP. 19780906 200604 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 263.364.000,00 atau mencapai 29.66% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 888.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 5.932.468.988,00 atau mencapai 24,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp 24.073.921.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 123.580.624.619,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 7.838.857.276,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp, 115.741.767.343,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 122.038.350.685,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 267.139.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.797.684.429,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13.530.545.429,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp3.051.560,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-13.527.493.869,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp129.903.566.126,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-13.527.493.869,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 5.662.278.428,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 122.038.350.685,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

NO	URAIAN	2023			2022	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	6	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			0		0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0,	0,	0	0,	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	750.000.000,	1.046.750.974,	140	617.809.440,	30
	PENERIMAAN HIBAH	0,	0,	0	0,	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	750.000.000,	1.046.750.974,	140	617.809.440,	30
B	BELANJA			0		0
	BELANJA PEGAWAI	4.044.226.000,	2.339.766.163,	58	2.096.007.954,	48
	BELANJA BARANG	17.425.053.000,	4.655.372.376,	27	14.325.928.058,	21
	BELANJA MODAL	200.000.000,	45.615.700,	23	1.719.516.000,	5
	Jumlah	21.669.279.000,	7.040.754.239,		18.141.452.012,	0

II. NERACA

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NERACA
PER 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000.000,	0	300.000.000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	792.500,	0	792.500	0,00
Persediaan	6.318.414.423,	6.494.185.036	(175.770.613)	(2,71)
JUMLAH ASET LANCAR	6.619.206.923,	6.494.185.036	125.021.887	1,93
ASET TETAP				
Tanah	80.183.520.000,	80.183.520.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	48.678.972.602,	48.281.102.902	397.869.700	0,82
Gedung dan Bangunan	26.741.600.491,	26.741.600.491	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.766.731.600,	1.766.731.600	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	52.500.000,	52.500.000	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(41.740.863.098,)	(41.609.518.643)	(131.344.455)	0,32
JUMLAH ASET TETAP	115.682.461.595,	115.415.936.350	266.525.245	0,23
JUMLAH ASET	122.301.668.518,	121.910.121.386	391.547.132	0,32
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.104.200.032,	67.575.651	1.036.624.381	1.534,02
Utang Yang Belum Ditagihkan	146.544.226,	0	146.544.226	0,00
Uang Muka dari KPPN	300.000.000,	0	300.000.000	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	792.500,	0	792.500	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.551.536.758,	67.575.651	1.483.961.107	2.196,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.551.536.758,	67.575.651	1.483.961.107	2.196,00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	120.750.131.760,	121.842.545.735	(1.092.413.975)	(0,90)
JUMLAH EKUITAS	120.750.131.760,	121.842.545.735	(1.092.413.975)	(0,90)
JUMLAH EKUITAS	120.750.131.760,	121.842.545.735	(1.092.413.975)	(0,90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	122.301.668.518	121.910.121.386	391.547.132	0,32

II. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	958.562.000,	267.139.000,
JUMLAH PENDAPATAN		958.562.000,	267.139.000,
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.601.104.146,	2.461.969.510,
Beban Persediaan	D.3.	1.382.027.383,	1.044.815.101,
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.343.751.510,	1.586.627.626,
Beban Pemeliharaan	D.5.	935.586.630,	901.468.889,
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.091.608.090,	642.143.981,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	0,	1.965.935.998,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0	0
JUMLAH BEBAN		8.354.077.759	8.602.961.105
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.395.515.759,)	(13.530.545.429,)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	88.188.974,	3.051.560,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		88.188.974,	3.051.560,
SURPLUS/DEFISIT - LO		(7.307.326.785,)	(13.527.493.869,)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	121.842.545.735,	129.903.566.126,
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(7.307.326.785,)	(13.527.493.869,)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	220.909.545,	0,
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.994.003.265,	5.662.278.428,
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(1.092.413.975,)	(7.865.215.441,)
EKUITAS AKHIR	E.6.	120.750.131.760,	122.038.350.685,

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani" (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	750.000.000,	750.000.000,
Jumlah Pendapatan	750.000.000,	750.000.000,
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,044,226,000,00	4,044,226,000,00
Belanja Barang Operasional	1,960,951,000,00	1,998,081,000,00
Belanja Barang Non Operasional	2,142,589,000,00	2,266,151,000,00
Belanja Barang Persediaan	2,266,151,000,00	3,072,445,000,00
Belanja Jasa	1,328,512,000,00	1,036,312,000,00
Belanja Pemeliharaan	2,194,964,000,00	2,246,810,000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,602,937,000,00	2,852,955,000,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	68,000,000
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3,489,850,000	3,884,299,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000 ,00	200,000,000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	186.485.000,00
Jumlah Belanja	22,299,911,000,00	21,669,279,000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.046.750.974,00 atau mencapai 140,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 750.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	750.000.000,00	947.662.000,00	126,35
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	1.600.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	9.300.000,00	,00
Jumlah	750.000.000,00	1.046.750.974,00	140,00

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 93,5% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi	947.662.000,00	840.120.500,00	88,65
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	4.814.000,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	1.130.967,00	0,00
Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu	1.600.000,00	193,00	0,01
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.300.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.046.750.974,00	976.126.797,00	93,25

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 7.040.754.239,00 atau 32,49% dari anggaran belanja sebesar Rp. 21.669.279.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4.044.226.000,	2.339.766.163,	57,85
Belanja Barang	17.425.053.000,	4.655.372.376,	26,72
Belanja Modal	200.000.000,	45.615.700,	22,81
Total Belanja Kotor	21.669.279.000,	7.040.754.239,	32,49
Pengembalian Belanja		0,00	0,00
Total Belanja	21.669.279.000,	7.040.754.239,	32,49

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 392,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	2.339.766.163,	4.008.477.551	171,32
Belanja Barang	4.655.372.376,	16.834.865.386	361,62
Belanja Modal	45.615.700,	6.757.729.188	14814,48
Total Belanja	7.040.754.239,	27.601.072.125	392,02

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.008.477.551,00 dan Rp3.929.533.135,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,01% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai, kenaikan tunjangan tertentu dan kenaikan pangkat serta penambahan tunjangan keluarga

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.339.766.163	4.009.629.691,00	171,37
Jumlah Belanja Kotor	2.339.766.163	4.009.629.691,00	171,37
Pengembalian Belanja Pegawai	0	-1.152.140,00	0,00
Jumlah Belanja	2.339.766.163	4.009.629.691,00	171,37

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.157.080.720,00 dan Rp 16.834.865.386,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 163.22% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja barang bertambah karena pembelian barang untuk penambahan pengujian dan pelanggan yang menguji pada satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	854.620.022	1.534.775.516	179,59
Belanja Barang Non Operasional	695.292.189	4.326.360.634	622,24
Belanja Barang Persediaan	897.270.657	2.315.167.836	258,02

Belanja Jasa	508.485.623	743.123.353	146,14
Belanja Pemeliharaan	745.942.757,	1.236.841.504	165,81
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.037.779.472,	1.489.162.019	143,50
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	417.690.000	5.194.723.324	1.243,68
Jumlah Belanja Kotor	5.157.080.720	16.840.154.186	326,54
Pengembalian Belanja Barang	0	-5.288.800	-
Jumlah Belanja	5.157.080.720	16.834.865.386	163,22

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 45.615.700,00 dan Rp 6.575.615.188,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14415,25% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pembelian peralatan pengujian dan pendukung lainnya

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.615.700	6.575.615.188	14415,25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	182.114.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	45.615.700	6.575.615.188	14415,25
Pengembalian Belanja Modal		0	0,00
Jumlah Belanja	45.615.700	6.575.615.188	14415,25

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 45.615.700,00 dan Rp 6.575.615.188,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14415,25% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tambahan Belanja Modal Peralatan Mesin adanya pembelian peralatan mesin untuk pengujian

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.615.700	6.575.615.188	14415,25
Jumlah Belanja Kotor	45.615.700	6.575.615.188	14415,25
Pengembalian Belanja		0,00	0,00
Jumlah Belanja	45.615.700	6.575.615.188	14415,25

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Tidak ada pembangunan bangunan baru pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.617.500,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	1.617.500,00
Jumlah	0,00	1.617.500,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.318.414.423,00 dan Rp 12.341.870.248,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	253.431.186,00	289.421.682,00
Bahan untuk Pemeliharaan	56.736.663,00	72.403.888,00
Suku Cadang	713.925.101,00	992.764.107,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	417.690.000,00	4.996.631.324,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	198.092.000,00
Bahan Baku	4.874.444.179,00	5.792.557.247,00
Persediaan Lainnya	2.187.294,00	0
Jumlah	6.318.414.423,00	12.341.870.248,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 80.183.520.000,00 dan Rp 80.183.520.000,00. Tidak ada penambahan nilai pada Tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 48.678.972.602,00 dan Rp 46.287.472.902,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	48.287.472.902,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	397.869.700,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Saldo per 30 Juni 2023	48.678.972.602,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0,00
Nilai Buku per 30 Juni 2023	48.678.972.602,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Saldo pada Peralatan dan Mesin yaitu Rp 48,685,342,602. Yaitu terdiri dari saldo awal Per 31 Desember 2022 Rp 48,287,472,902 dan mutasi bertambah Rp 397,869,700. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut: pada semester 1 tahun 2023 terdapat Pembelian Alat Laboratorium yang berupa sarana dan prasarana yaitu 2 buah AC

dengan nilai Rp 17,615,700 dan Komputer Unit Berupa Notebook 2 buah dengan nilai Rp 28,000,000 serta terdapat Mutasi Bertambah yang berasal dari Perolehan Saldo Awal yang berasal dari Akun 52 Pembelian Alat Angkutan Darat Bermotor R4 Tahun 2020 senilai Rp 223,000,000. Alat Kantor Berupa Almari File 3 buah senilai Rp 52,827,000 dan Alat Rumah Tangga Berupa Meja Kerja kayu 4 buah senilai Rp 76,427,000.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.741.600.491,00 dan Rp26.411.729.491,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	26.741.600.491,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Saldo per 30 Juni 2023	26.741.600.491,00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-3.577.175.522,00
Nilai Buku per 30 Juni 2023	23.164.424.969,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Tidak ada penambahan nilai.
2. Tidak ada nilai mutasi berkurang

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.766.731.600,00 dan Rp1.766.731.600,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp52.500.000,00 dan Rp52.500.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-41.609.518.643,00 dan Rp-41.609.518.643,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	48.685.342.602,00	-37.660.889.100,00	11.024.453.502,00
2.	Gedung dan Bangunan	26.741.600.491,00	-3.577.175.522,00	23.164.424.969,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.766.731.600,00	-502.418.876,00	1.264.312.724,00
4.	Aset Tetap Lainnya	52.500.000,00	-48.500.000,00	4.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		77.246.174.693,00	-41.788.983.498,00	35.457.191.195,00,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.104.200.023,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1. ,104,200,032,00	0,00
Jumlah	1. ,104,200,032,00	0,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp130.914.516.437,00 dan Rp123.101.555.925,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.046.750.974,00 dan Rp 845.447.967,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	88.188.974,00	1.130.967,00	1,28
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.600.000,	1.000.000,00	62,50
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.300.000,	4.450.000,00	47,85
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	947.662.000,,	838.753.000,00	88,51
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	114.000,00	0
Jumlah	1.046.750.974,00	845.447.967,00	88,51

Kenaikan Pendapatan bukan pajak yang didapat pada pengujian dan sertifikasi serta sarana dan prasarana tusi pada tahun 2023

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.339.766.163,00 dan Rp 4.008.477.551,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.629.245.120,	2.670.095.540,00	1,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.963,	39.099,00	3,66

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	33.283.798,00	58.281.906,00	175,11
Beban Tunj. Beras PNS	91.321.620,00	161.931.120,00	177,32
Beban Tunj. Fungsional PNS	271.550.000,00	398.770.000,00	146,85
Beban Tunj. PPh PNS	8.647.582,00	8.297.180,00	95,95
Beban Tunj. Struktural PNS	13.140.000,00	29.700.000,00	226,03
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	102.484.080,00	178.904.770,00	174,57
Beban Tunjangan Umum PNS	21.895.000,00	47.484.936,00	216,88
Beban Uang Makan PNS	168.173.000,00	454.973.000,00	270,54
Jumlah	2.339.766.163,00	4.008.477.551,00	171,32

Beban pegawai pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan terdapat kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional erta adanya mutasi pegawai yang ada pada tahun 2023

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.610.386.582,00 dan Rp 2.034.856.843,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	5.358.435.778	1.653.688.010,00	30,86
Beban Persediaan konsumsi	249.763.510	381.168.833,00	152,61
Beban persediaan lainnya	2.187.294	0	0,00
Jumlah	5.610.386.582	2.034.856.843,00	36,27

Terdapat penabahan pada persediaan tahun 2023 dikarenakan adanya penabahan pengujian maupun metode uji baru untuk mendukung kinerja dari Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.955.668.491,00 dan Rp 6.558.131.546,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	897.270.657,00	39.162.378,00	4,36
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.770.981.668,00	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	695.292.189,00	1.516.216.588,00	218,07
Beban Barang Operasional Lainnya	96.649.963,00	43.059.225,00	44,55
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	92.490.000,00	182.566.000,00	197,39
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	209.332.000,00	0
Beban Jasa Profesi	87.650.000,00	21.750.000,00	24,81
Beban Keperluan Perkantoran	614.562.349,00	1.175.766.290,00	191,32
Beban Langganan Air	17.679.900,00	29.783.500,00	168,46
Beban Langganan Listrik	370.520.939,00	428.476.863,00	115,64
Beban Langganan Telepon	1.684.784,00	6.353.033,00	377,08
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	48.362.210,00	125.573.501,00	259,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.555.500,00	7.810.500,00	305,63
Beban Sewa	30.950.000,00	1.300.000,00	4,20
Jumlah	2.955.668.491,00	6.558.131.546,00	29,05

Terdapat biaya beban yang ditanggung oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang dalam semester 1 ini mengalami kenaikan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.516.604.521,00 dan Rp 1.625.923.192,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.039.404,00	532.772.244,00	507,21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.985.413,00	285.291.164,00	126,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	415.917.940,00	418.778.096,00	100,69
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	56.736.663,00	38.964.997,00	68,68
Beban Persediaan suku cadang	713.925.101,00	350.116.691,00	49,04
Jumlah	1.516.604.521,00	1.625.923.192,00	107,21

Terdapat biaya pemeliharaan yang terdapat pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan pada tahun 2023 dikarenakan jumlah alat alat laboratorium yang sudah canggih dan memerlukan biaya perawatan yang tinggi dikarena bahan bahan spare part didatangkan dari luar negeri/ tempat dibuatnya alat tersebut

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.037.779.472,00 dan Rp 1.489.162.019,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	662.693.684,00	540.075.513,00	81,50
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	893.416.497,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.480.000,00	6.600.000,00	24,02
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.430.000,00	4.200.000,00	25,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	331.175.788,00	44.870.009,00	13,55
Jumlah	1.037.779.472,00	1.489.162.019,00	143,50

Pada Biaya Perjalanan Dinas terdapat kenaikan karena jumlah perjalanan rapat serta perjalanan Calon Penerima dan calon lokasi dari bantuan pemerintah tersebar di Propinsi Jawa Barat dan Banten bertambah.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 41.740.863.098,00 dan Rp 41.740.863.098,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.577.175.522,00	3.577.175.522,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	379600,00	379600,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	453.918.876,00	453.918.876,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.660.889.100,00	37.660.889.100,00	0,00
Jumlah	41.740.863.098,00	41.740.863.098,00	0,00

Tidak ada perubahan dari amortisasi dan penyusutan pada aset tetap dan Gedung bangunan

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp -6.873,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0	-6.873,00	0
Jumlah	0	-6.873,00	0

Pada tahun 2023 tidak terdapat piutang tak tertagihkan

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	193,00	193,00
Jumlah	0,00	193,00	193,00

Pada tahun 2023 Tidak terdapat pos surplus/deficit dari kegiatan Non Operasional.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 129,903,566,126,00 dan Rp121.842.542.735,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp -7.307.326.785,00 dan Rp -13.527.493.869,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5,994,003.265,00 dan Rp 5.662.278.428,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.994.003.265,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00
Jumlah	5.994.003.265,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2023 saldo **DDEL** adalah sebesar Rp 1.046.750.974,00 sedangkan **DKEL** sebesar Rp 7.040.754.239,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 120.750.131.760,00 dan Rp 122.038.350.685,00.



ROUTING SLIP

Laporan Keuangan Tingkat Unit Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
(UAKPA/B)

TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Satker : Bpms.P.H
Jenis Kewenangan : KD
Kode Satker : 010.06.0200.567235.000.KD
Alamat Satker : Jl. Pemuda No. 29 di Kota Bogor
CP Modul GLP : 0813.1011.2338
CP Modul Persediaan + AT : 0813.111.540.161

NO	PETUGAS VERIFIKASI/REVIU	HARI/TANGGAL	PUKUL	PARAF/TTD VERIFIKATOR/REVIU
1.	Modul GLP (Verifikasi)	Rabu, 14/7 ²³	12.30	
2.	Modul Persediaan + AT (Verifikasi)	Rabu, 12/7 ²³	20.31	
3.	Reviu (Itjen)	Kammi 13/7	10.30	

Operator Modul GLP

(ERWIN.....)

Operator Modul Persediaan + AT

(Prof. Pramonu.....)

VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN/BARANG SEMESTER I TA 2023
SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE SATKER : 567275 KODE ESELON I : KEWENANGAN : KD
NAMA SATKER : BPMSPH
NAMA OPERATOR : Erwin NO HP/TLP : 081310112378

MODUL GLP

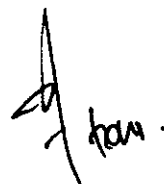
HASIL VERIFIKASI

Staf Sukar Kitaran

revisi rencana modul aset barang = modul Gd.

pas lainnya di band. penguasaan merupakan paket yang belum di satorkan.

~~revisi rencana~~
uang pada paket barang merupakan penguasaan bahan yang masih dalam proses gad.



Verifikator Modul GLP

VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN/BARANG SEMESTER I TA 2023

SATKER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DE : 567275 KODE KEWENANGAN : KD
KER : ESELON I
AA : BPMSPT
KER :
AA OPERATOR : PRAMONO NO HP/TLP : 082111540162

MODUL
PERSEDIAAN + AT

IL VERIFIKASI

Saldo Awal TA 2023 sesuai Neraca Audited TA 2022

Senilai Rp. 121.910.121.386,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 45.615.700

berupa 2 unit laptop dan 2 unit AC

Belanja barang akun 5218 senilai Rp 903.270.657 sudah di detailkan pada Modul Persediaan

Belanja barang di serahkan ke masyarakat akun 526 115

Realisasi Rp 417.690.000 berupa kambing domba sebanyak

175 ekor u/ 7 kelompok di wilayah Prov. Jawa Barat

Basthanpem TA 2023 sudah selesai penginputan u/

AKun 526 TA 2023

Belum melaksanakan Roadmap Inventarisasi BMN

Saldo awal tahun berjalan berupa meja, lemari, dan kendaraan

yg berasal dari belanja 521 pengadaan di bawah tahun 2023

• telah di input pada Modul Aset Tetap

Verifikator Modul Persediaan + AT


mi 2023

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



ENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DAERAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

JANIS/KERJA : (587275) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Tgl Data : 11/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 11/07/23 9:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	792,500	0	792,500	0.00
Persediaan	6,318,414,423	6,494,185,036	(175,770,613)	(2.71)
JUMLAH ASET LANCAR	6,619,206,923	6,494,185,036	125,021,887	1.93
ASET TETAP				
Tanah	80,183,520,000	80,183,520,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	48,678,972,602	48,281,102,902	397,869,700	0.82
Gedung dan Bangunan	26,741,600,491	26,741,600,491	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,766,731,600	1,766,731,600	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	52,500,000	52,500,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(41,740,863,098)	(41,609,518,643)	(131,344,455)	0.32
JUMLAH ASET TETAP	115,682,461,595	115,415,936,350	266,525,245	0.23
JUMLAH ASET	122,301,668,518	121,910,121,386	391,547,132	0.32
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,104,200,032	67,575,651	1,036,624,381	1,534.02
Utang Yang Belum Ditagihkan	146,544,226	0	146,544,226	0.00
Utang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	792,500	0	792,500	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,551,536,758	67,575,651	1,483,961,107	2,196.00
JUMLAH KEWAJIBAN	1,551,536,758	67,575,651	1,483,961,107	2,196.00
EKUITAS				
LIABILITAS				
Ekuitas	120,750,131,760	121,842,545,735	(1,092,413,975)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	120,750,131,760	121,842,545,735	(1,092,413,975)	(0.90)
JUMLAH EKUITAS	120,750,131,760	121,842,545,735	(1,092,413,975)	(0.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	122,301,668,518	121,910,121,386	391,547,132	0.32

Angka :

REVISI FINAL

REVISI BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 11 Juli 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Plt. Kepala Balai

drh. Imron Suandy, MVPH
 197809062006041002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
 BELON I : 06
 ILAYAH/PROVINSI : 0200
 ATUAN KERJA : 567275
 ENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 JAWA BARAT
 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 11/07/23 10:19 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_tra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 11/7/23 6:51 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
22113	Belanja Langganan Air	48,000,000	38,400,000	17,679,900	0	17,679,900	46.04	20,720,100
22141	Belanja Sewa	52,812,000	54,912,000	30,950,000	0	30,950,000	56.36	23,962,000
22151	Belanja Jasa Profesi	265,700,000	181,000,000	87,650,000	0	87,650,000	48.43	93,350,000
22191	Belanja Jasa Lainnya	200,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,328,512,000	1,036,312,000	508,485,623	0	508,485,623	49.07	527,826,377
231	Belanja Pemeliharaan							
23111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	536,220,000	553,800,000	105,039,404	0	105,039,404	18.97	448,760,596
23121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	409,230,000	443,496,000	224,985,413	0	224,985,413	50.73	218,510,587
23129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,249,514,000	1,249,514,000	415,917,940	0	415,917,940	33.29	833,596,060
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,194,964,000	2,246,810,000	745,942,757	0	745,942,757	33.2	1,500,867,243
241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
24111	Belanja Perjalanan Biasa	2,019,335,000	2,048,132,000	662,693,684	63,802,621	598,891,063	32.36	1,449,240,937
24113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,050,000	48,600,000	27,480,000	900,000	26,580,000	56.54	22,020,000
24114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,070,000	28,560,000	18,430,000	1,590,000	14,840,000	57.53	13,720,000
24119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,544,482,000	727,663,000	331,175,788	17,725,723	313,450,065	45.51	414,212,935
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,602,937,000	2,852,955,000	1,037,779,472	84,018,344	953,781,128	36.38	1,899,193,872
242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
24211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000
261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
26115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	3,489,850,000	3,884,299,000	0	0	0	0	3,884,299,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	3,489,850,000	3,884,299,000	0	0	0	0	3,884,299,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	18,055,885,000	17,425,053,000	4,739,390,720	84,018,344	4,655,372,376	27.2	12,769,680,624
3	BELANJA MODAL							
321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
32111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000	200,000,000	45,615,700	0	45,615,700	22.81	154,384,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	200,000,000	200,000,000	45,615,700	0	45,615,700	22.81	154,384,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	200,000,000	200,000,000	45,615,700	0	45,615,700	22.81	154,384,300
	JUMLAH BELANJA	22,299,911,000	21,689,279,000	7,124,772,583	84,018,344	7,040,754,239	32.88	14,628,524,761

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



MENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06

TUAN KERJA : BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR 567275

Tgl Data : 11/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/07/23 5:33 PM

Halaman : 2

lap_ira_face_satker_komparatif

D	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	21,669,279,000	7,040,754,238	14,628,524,761	32	24,073,921,000	6,932,466,988	18,141,452,012	29
	PEMBIAYAAN				0				0

Perangan :

LUM FINAL

MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 11 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Prt. Kepala Balai

drh. Imron Suandy, MYPH
197809062006041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (567275) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Tgl Data : 11/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 11/07/23 9:49 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2023	KENAIKAN PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	958,562,000	267,139,000	691,423,000	258.825
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	958,562,000	267,139,000	691,423,000	258.825
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	958,562,000	267,139,000	691,423,000	258.825
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,601,104,146	2,461,969,510	139,134,636	5.651
Beban Persediaan	1,382,027,383	1,044,815,101	337,212,282	32.275
Beban Barang dan Jasa	2,343,751,510	1,586,627,626	757,123,884	47.719
Beban Pemeliharaan	935,586,630	901,468,889	34,117,741	3.785
Beban Perjalanan Dinas	1,091,608,090	642,143,981	449,464,109	69.994
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	5,194,723,324	(5,194,723,324)	(100)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (567275) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Tgl Data : 11/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 11/07/23 9:49 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2021	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	1,965,935,998	(1,965,935,998)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,354,077,759	13,797,684,429	(5,443,606,670)	(39.453)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,395,515,759)	(13,530,545,429)	6,135,029,670	(45.342)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	88,188,974	3,051,560	85,137,414	2,789.964
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	88,188,974	3,051,560	85,137,414	2,789.964
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	88,188,974	3,051,560	85,137,414	2,789.964
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,307,326,785)	(13,527,493,869)	6,220,167,084	(45.982)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,307,326,785)	(13,527,493,869)	6,220,167,084	(45.982)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala Balai

drh. Imron Suandy, MVPH

197809062006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (567275) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Tgl Data : 11/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 11/07/23 10:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	121,842,545,735	129,903,566,126	(8,061,020,391)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,307,326,785)	(13,527,493,869)	6,220,167,084	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	220,909,545	0	220,909,545	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	220,909,545	0	220,909,545	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,994,003,265	5,662,278,428	331,724,837	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,092,413,975)	(7,865,215,441)	6,772,801,466	-
EKUITAS AKHIR	120,750,131,760	122,038,350,685	(1,288,218,925)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bogor, 11 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Plt. Kepala Balai

drh. Imron Suandy, MvPH

197809062006041002